

ANALISIS LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PADA PEMBELAJARAN PAI

Eka Yanuarti

Ekayanuarti14@gmail.com

Dosen Pendidikan Agama Islam IAIN Curup

Devi Purnama Sari Hs

devipurnamasarihs@gmail.com

Mahasiswa Pendidikan Agama Islam IAIN Curup

ABSTRAK

Kemunculan multikulturalisme tidak terlepas dari pengaruh filsafat Post-Modernisme. Prinsip-prinsip paradigmatis yang menjadi dasar filosofis bagi pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis multikultural adalah sebagai berikut: 1) mendidik peserta didik untuk berani belajar hidup dalam perbedaan; 2) mendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam membangun rasa saling percaya kepada semua orang dengan latar belakang berbeda; 3) mendorong peserta didik untuk mampu memelihara saling pengertian di antara sesama teman yang beragama; 4) menjadikan peserta didik dapat menjunjung sikap saling menghargai; 5) berorientasi untuk melahirkan peserta didik untuk terbuka dalam berpikir, mampu membuka diri bagi pandangan orang lain yang berbeda; 6) menghasilkan peserta didik yang dapat bersikap apresiatif dan memahami bahwa dalam hidup ada keharusan menjalin relasi yang menunjukkan interdependensi antara satu orang/kelompok dengan orang/kelompok lain; 7) mendorong peserta didik ke arah pemahaman pentingnya resolusi konflik dan rekonsiliasi tanpa kekerasan.

Kata Kunci: Filosofis PAI, Multikultural

ABSTRACT

The emergence of multiculturalism is inseparable from the influence of Post-Modernism philosophy. The paradigmatic principles that form the philosophical basis for multicultural-based Islamic Religious Education (PAI) educators are as follows: 1) educating students to dare to learn to live in differences; 2) encourage students to have competence in building mutual trust for all people with different backgrounds; 3) encourage students to be able to maintain mutual understanding among diverse peers; 4) make students can respect mutual respect; 5) oriented to give birth to students to be open in thinking, able to open themselves to other people's views that are different; 6) produce students who can be appreciative and understand that in life there is a need to establish relationships that show interdependence between one person / group with another person / group; 7) encourage students towards understanding the importance of conflict resolution and reconciliation without violence.

Keywords: Philosophical PAI, Multicultural

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh pendidikan. Tanpa adanya Pendidikan Agama Islam proses pembelajaran tidak akan berhasil dengan baik, karena dalam pendidikan agama islam mencetak peserta didik berakhlakul karimah dan mentaati segala peraturan perundang undangan di indonesia. Mengingat saat ini banyak dari siswa dan mahasiswa yang bertawuran dan melanggar etika dan juga undang undang Negara, bahkan pelecehan seksualpun banyak di lakukan oleh remaja yang tak lain semua itu terdiri dari pelajar dan mahasiswa maka dianggap penting adanya pendidikan agama islam masuk sebagai kurikulum dalam pendidikan, khususnya kurikulum PAI di Sekolah, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum tersebut sama-sama membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang

kuat dapat berakibat fatal dalam pendidikan.

Tujuan dari suatu kurikulum PAI di sekolah dapat benar-benar tercapai, maka perlu adanya suatu pengembangan kurikulum yang berdasarkan pada landasan-landasan serta prinsip-prinsip yang berlaku. Hal ini mengingat bahwa suatu kurikulum tersebut diharapkan dapat memberikan landasan dan menjadi pedoman bagi pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat serta dapat menjadi siswa yang beriman dan bertakwa

Isu pendidikan agama, dalam konteks bangsa Indonesia yang plural, multikultur, multietnis, dan multireligius menjadi isu yang krusial. Oleh karena itu diperlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak agar tidak berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang akan merugikan bagi tumbuhnya proses demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktek kekerasan yang mengatasnamakan agama, dari fundamentalisme, radikalisme, hingga

terorisme, akhir-akhir ini semakin marak di tanah air. Kesatuan dan persatuan bangsa saat ini sedang diuji eksistensinya. Berbagai indikator yang memperlihatkan adanya tanda-tanda perpecahan bangsa, dengan transparan mudah kita baca.¹

Bila dicermati, agama seharusnya dapat menjadi pendorong bagi umat manusia untuk selalu menegakkan perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh umat di bumi ini. Namun, realitanya agama justru menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan kehancuran umat manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya preventif agar masalah pertentangan agama tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Merujuk pada kasus di atas, maka salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan mengembangkan kebijakan maupun konsep pendidikan agama yang dikelola dengan semangat multikultural, dan bukan dengan semangat doktrinal sepihak semata, atau penanaman kebencian terhadap pemeluk agama lain,

atau dengan menumbuhkan rasa acuh tak acuh terhadap agama, atau dengan upaya pemindahan agama peserta didik. Oleh sebab itu, penelitian yang berkaitan dengan upaya menemukan konsep pendidikan agama berbasis multikultural perlu dilakukan. Ini dapat dimulai melalui perumusan teori dan konsep untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang ada di lingkungan masyarakat Muslim dan lembaga pendidikan nasional baik yang berada dibawah koordinasi Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan Nasional.

Usaha dalam merumuskan PAI berbasis multikultural diperlukan landasan-landasan filosofis, karena filsafat dalam arti filosofis merupakan suatu cara pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan oleh para ahli. Selain itu filsafat juga berfungsi memberikan arah bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran filsafat tertentu yang

¹Lasijan, *Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam*, Jurnal TAPIS Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014, h. 125-139.

memiliki relevansi dengan kehidupan nyata.²

Untuk itu pada makalah ini penulis mencoba membahas tentang aspek-aspek filosofis PAI Berbasis multikultural dengan sub bahasan yaitu: landasan filosofis kemunculan pendidikan multikultural, landasan filosofis pengembangan kurikulum berbasis multikultural, pendidikan multikultural dalam perspektif filosofis, prinsip-prinsip filosofis PAI berbasis multikultural.

PEMBAHASAN

1. Landasan Filosofis Kemunculan Pendidikan Multikultural

Keragaman dan perbedaan dalam kehidupan manusia merupakan *sunnatullah*. Alquran sebagai representasi pesan-pesan Allah untuk menjadi panduan umat manusia, sesungguhnya telah memberikan beberapa isyarat penting, baik secara eksplisit maupun implisit tentang eksistensi keragaman dan perbedaan

tersebut. Di antaranya dapat dilihat dalam QS. al-Hujurat [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”³

Melalui ayat ini Allah swt menyatakan bahwa manusia diciptakan terdiri atas jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka dapat saling kenal dan mengenal atau saling *taffahum*, *ta'awun*, dan *tabayyun* sesama

² Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), h.33.

³Lihat QS. al-Hujurat [49]: 13 dan lihat juga beberapa ayat lain yang termuat di dalamnya nilai-nilai tentang pengakuan terhadap adanya keragaman atau perbedaan, di antaranya: QS. al-Baqarah [2]: 285; Ali-Imran [3]: 3, 4, 84, 64-68; al-Maidah [5]: 48; al-Hajj [22]: 67-69; al-Hadid [57]: 27

mereka. Manusia yang secara fitrah adalah makhluk sosial, maka hidup bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan adanya. Melalui kehidupan yang bersifat kolektif sebagai sebuah masyarakat, tentu di dalamnya terdapat banyak keragaman atau perbedaan dalam berbagai hal.⁴

Kata *syu'ub* yang terdapat dalam ayat ini merupakan bentuk plural dari kata *sy'aba* yang berarti golongan atau cabang, sedangkan kata *qaba'il* merupakan bentuk jamak dari kata *qabilah* yang berarti sekumpulan orang yang bertemu yang satu sama lainnya bisa saling menerima. Kata *qaba'il* selalu menunjuk pada dua pihak atau lebih yang saling berpasangan atau berhadap-hadapan. Oleh karena itu, manusia sejak diciptakan walaupun dari rahim yang berbeda-beda tetapi hakikatnya ia adalah makhluk interdependensi (sosial) yang saling bergantung satu sama lainnya.⁵

⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), h. 320.

⁵Waryono Abdul Gafur, *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), h. 11-12.

Alquran surah Al-Hujurat [49]: 13 secara konteks turun sebagai respon atas pemikiran sempit sebagian sahabat terhadap fenomena perbedaan kulit serta kedudukan, dan menyebabkan mereka memiliki pandangan yang diskriminatif terhadap orang lain,⁶ merupakan salah satu persoalan yang masih terus terjadi hingga saat ini. Sikap memandang rendah orang lain, primordialisme (*ashabiyah*), tidak siap berbeda dan memperlakukan orang lain dengan tidak adil, adalah di antara sikap-sikap yang mengindikasikan masih lemahnya semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat saat ini, baik secara konsep maupun praktek.

Sebagai sebuah konsep, kemunculan multikulturalisme tidak terlepas dari pengaruh filsafat *post-*

⁶Dalam satu riwayat dikemukakan, ketika fathu Mekah Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Beberapa orang berkata "apakah pantas budak hitam ini azan di atas Ka'bah?", maka berkatalah yang lainnya "sekiranya Allah membenci orang ini, pasti Dia akan menggantinya." Kemudian ayat ini turun sebagai penegasan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi dan yang paling mulia adalah yang bertaqwa (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hattim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaikah). Lihat lebih lengkap dalam K.H.Q. Shaleh H.A.A. Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Alquran* (Bandung: CV. Diponegoro, 2001), h. 518.

modernisme, yang berangkat dari pemikiran tentang ketidakpercayaan terhadap segala bentuk narasi besar dan penolakan terhadap segala bentuk pemikiran yang mentotalisasi atau menjeneralisasi. Selain menolak pemikiran yang totaliter, filsafat post-modernisme juga menghaluskan sensitifitas manusia terhadap perbedaan dan memperkuat kemampuan toleransi terhadap realitas yang terukur.

Post-modernisme menolak kebenaran tunggal atau yang bersifat absolut dan menghindari sikap klaim kebenaran (*truth claim*). Kebenaran diyakini bersifat jamak dan hakikat dari semua, termasuk kehidupan manusia itu dalam semua aspeknya adalah berbeda (*all is difference*).⁷

Filsafat post-modernisme yang muncul sebagai bentuk protes terhadap pemikiran filsafat modernisme,⁸

⁷Ali Maksum, et.al (ed.), Pendidikan ..., h. 292 dan Rizal Muntasyir, dkk, Filsafat Ilmu (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 190

⁸Walaupun post-modernisme berarti kelanjutan modernisme, namun kelanjutan yang dimaksud lebih bersifat kritis. Bahkan dalam banyak aspek, post-modernisme merupakan lawan dari modernisme yang lebih banyak dipengaruhi oleh filsafat positivisme. Post-modernisme menggugat keamanan modernisme yang lebih mengagungkan

melahirkan beberapa bentuk pemikiran yang sangat mendasar, seperti realisme, relativisme, dan humanisme. Salah satu dampak positif yang menonjol dari pemikiran post-modernisme adalah lahirnya pengakuan akan pluralitas kehidupan. Bagi post-modernisme, kenyataan adanya masyarakat plural itu menjadi suatu fakta yang tidak bisa disangkal. Hal ini harus diperkuat dengan membangun prinsip kesadaran pluralisme⁹ dan multikulturalisme, yakni paham yang mengakui adanya keragaman dalam kehidupan sekaligus memperlakukan orang lain secara sama secara proporsional.

Pengokohan multikulturalisme yang berangkat dari pemikiran filosofis di atas, perlu menjadi bahan pertimbangan untuk dikembangkan dalam pendidikan Islam. Landasan

rasionalitas dan telah melahirkan dunia yang merendahkan martabat manusia, sehingga melahirkan budaya kekuatan bagi yang berkuasa dan praktek kejahatan moral yang kian menjadikannya. Filsafat post-modernisme berusaha membalikkan fakta ini dengan mengedepankan seni filsafat yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Lihat Bambang Sugiharto, Posmodernisme Tantangan Bagi Filsafat (Yogyakarta: kanisius, 1996), h. 22-23.

⁹Jean Farncois Lyotard, *Kondisi Postmodern: Suatu Laporan Mengenal Pengetahuan*, terj. D. Dian Ellyati (Surabaya: Selasar Publishing, 2009), h. 80.

epistemologi yang telah dibangun dengan cukup jelas oleh aliran filsafat postmodernisme dalam usaha mengakomodasi fakta keragaman maupun perbedaan, sesungguhnya dapat menjadi tambahan referensi yang ilmiah untuk memformulasi pendidikan Islam multikultural secara lebih baik. Tentu dalam proses ini diperlukan sikap adaptif-kritis agar konsep-konsep tersebut tetap sejalan dengan spirit dan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu fokus dari Pasal 4 Undang-undang NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab III yang membahas prinsip penyelenggaraan pendidikan.¹⁰ Melalui pasal ini dijelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural (budaya) dan

¹⁰Secara tegas berbunyi: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa." Lihat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Fokusmedia, 2005), h. 5

kemajemukan bangsa, sesuai dengan nilai-nilai dasar Negara, yakni Pancasila. Melalui dasar yuridis ini, maka pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia secara legal formal perlu memperhatikan aspek-aspek demokratis, keadilan, HAM, nilai-nilai atau norma (*values*) serta pengakuan terhadap aspek keragaman. Pengakuan terhadap segala bentuk keragaman tentu saja tidak cukup, karena itu diperlukan upaya untuk menyikap keragaman dengan perlakuan yang berlandaskan pada asas keadilan.

2. Landasan Filosofis Pengembangan Kurikulum Berbasis Multikultural

Pandangan-pandangan filsafat sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat akan menentukan arah ke mana peserta didik akan dibawa. Tujuan pendidikan memuat pernyataan-pernyataan mengenai berbagai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik selaras dengan sistem nilai dan falsafah yang dianutnya. Dengan demikian, sistem nilai atau filsafat yang dianut oleh suatu komunitas akan memiliki keterkaitan

yang sangat erat dengan rumusan tujuan pendidikan yang dihasilkannya. Dengan kata lain, falsafat pendidikan suatu negara tidak bisa dipungkiri akan mempengaruhi tujuan pendidikan di negara tersebut.

Filsafat membahas segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia termasuk dalam masalah-masalah pendidikan ini yang disebut filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan ini merupakan aplikasi dari pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan.

Ada empat fungsi filsafat dalam pengembangan kurikulum, yaitu:¹¹

- a. filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Dengan filsafat sebagai pandangan hidup atau *value system*, maka dapat ditentukan mau dibawa kemana anak didik itu.
- b. Filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

¹¹ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jakarta: Kencana, 2008), h.4-5.

- c. Filsafat dapat menentukan strategi atau atau cara pencapaian tujuan.
- d. Melalui filsafat dapat ditentukan bagaimana menentukan tolok ukur keberhasilan proses pendidikan.

Ada beberapa aliran filsafat pendidikan, seperti *perennialisme*, *essensialisme*, *eksistensialisme*, *progresivisme*, dan *rekonstruktivisme*. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Menurut Ella Yulaelawati aliran filsafat dan kaitannya dengan pengembangan kurikulum, yaitu:¹²

- a. *Perennialisme* lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran dan keindahan dari warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak

¹² Ella Yulaelawati, *Kurikulum dan Pembelajaran, Filosofi, Teori dan Aplikasi* (Bandung: Pakar Raya, 2004), h. 53

- terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu.
- b. *Essensialisme* menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains dan mata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat. Sama halnya dengan perenialisme, esensialisme juga lebih berorientasi pada masa lalu.
- c. *Eksistensialisme* menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang mesti memahami dirinya sendiri.
- d. *Progresivisme* menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif.
- e. *Rekonstruktivisme* merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada rekonstruktivisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Di samping menekankan tentang perbedaan individual seperti pada progresivisme, rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berfikir kritis dan sejenisnya. Aliran ini akan mempertanyakan untuk apa berfikir kritis, memecahkan masalah, dan melakukan sesuatu. Penganut aliran ini menekankan pada hasil belajar dan proses.

Dari ringkasan aliran-aliran filsafat yang disampaikan di atas, *progresivisme* adalah salah satu aliran filsafat yang sangat menekankan keaktifan dari peserta didik. *Progresivisme* adalah aliran filsafat yang menuntut pengalaman sebagai landasan pengembangan belajar. Begitu pula *rekonstruktivisme*, aliran ini sifatnya kritis, mempertanyakan segala sesuatu dan memiliki orientasi kepentingan masa depan. Sebagai catatan, penjabaran aliran-aliran filsafat

tersebut dalam kurikulum yaitu, aliran *filsafat perenialisme, essensialisme, eksistensialisme* merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan *Model Kurikulum Subjek-Akademis*. Sedangkan, filsafat *progresivisme* memberikan dasar bagi pengembangan *Model Kurikulum Pendidikan Pribadi*. Sementara, filsafat rekonstruktivisme banyak diterapkan dalam *Pengembangan Model Kurikulum Interaksional*.¹³

Masing-masing aliran filsafat tersebut terwujud dalam kemungkinan-kemungkinan sikap dan pendirian para pendidik, seperti:¹⁴

- a. Sikap *konservatif*, yakni mempertahankan nilai-nilai budaya manusia, sebagai perwujudan dari *essentialisme*,
- b. Sikap *regresif*, yakni kembali kepada jiwa yang menguasai abad

pertengahan, yaitu agama, sebagai perwujudan dari *perenialism*,

- c. Sikap bebas dan modifikatif sebagai perwujudan dari *progresivism*,
- d. Sikap radikal rekonstruktif sebagai perwujudan dari *reconstrucionism*,
- e. Sikap yang menekankan keterlibatan peserta didik dalam kehidupan empiris untuk mencari pilihan dan menemukan jati dirinya sebagai perwujudan dari *eksistensialism*.

Mengacu pada landasan filosofis pengembangan kurikulum di atas, maka tampak bahwa pengembangan kurikulum itu pada hakikatnya adalah pengembangan komponen-komponen yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri serta pengembangan komponen pembelajaran sebagai implementasi kurikulum. Landasan filosofis pengembangan kurikulum juga merupakan sistem nilai yang harus menjadi dasar dalam menentukan tujuan pendidikan. Sistem nilai bangsa Amerika misalnya, adalah bersifat liberalis demokratis, maka dengan demikian tujuan pendidikan di Amerika adalah membentuk manusia liberalis-

¹³Ella Yulaelawati, *Kurikulum dan Pembelajaran*,... h. 54. Lebih lanjut tentang model pengembangan kurikulum baca Nana Syaodih Sukmadinata (1997/2015), Muhaimin (2010). Wina Sanjaya (2008)

¹⁴Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Cet. 4 (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010), hal 79

demokratis. Begitu pula dengan sistem nilai di Tiongkok atau negara-negara Timur Tengah dan lain sebagainya. Di Indonesia, sistem nilai yang berlaku adalah Pancasila. Oleh sebab itu membentuk manusia yang Pancasilais merupakan tujuan dan arah segala ikhtiar berbagai level dan jenis pendidikan. Dengan demikian, isi kurikulum yang disusun harus memuat dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila.¹⁵ Falsafah Pancasila adalah landasan pengembangan kurikulum secara tersendiri yang cukup unik karena berbeda dengan aliran-aliran filsafat pada umumnya.

Di atas telah disebutkan bahwa landasan filosofis pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara fanatis hanya pada satu aliran filsafat pendidikan, karena masing-masing aliran filsafat saling menguatkan bangunan kurikulum. Begitu pula isi kurikulum pendidikan harus memuat dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Di sini kita akan melihat bahwa bangunan filsafat Pancasila ternyata sangat

mendukung pengembangan kurikulum berbasis keindonesiaan atau multikultural.

Pancasila sebagai sistem filsafat adalah pengungkapan dan penelaahan dunia fisik dan dunia riil secara sistemik (menyeluruh) dan sistematis (teratur, tersusun rapi), sehingga hidup manusia budaya ini mempunyai makna untuk kelestarian tata hidup yang selaras, serasi dan seimbang. Pancasila memberi ajaran tata hidup manusia budaya secara harmonis. Pancasila adalah filsafat keselarasan.¹⁶ Esensi dari multikulturalisme adalah ajaran tentang keharmonisan hidup dalam masyarakat yang majemuk.

Idealitas Pancasila sebagai landasan filosofis pengembangan kurikulum pendidikan multikultural memiliki titik temu yang sangat signifikan, baik Pancasila sebagai falsafah negara, ideologis, maupun sistem nilai. Entitas manusia Indonesia dalam mengamalkan amanah Pancasila

¹⁵ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran...* h. 4-5

¹⁶ Ki Fudyantanta, *Filsafat Pendidikan Barat dan Filsafat Pendidikan Pancasila, Wawasan Secara Sistemik* (Yogyakarta: Amus, 2006), h.170 buku ini menjelaskan secara sistemik bangunan Pancasila sebagai filsafat yang utuh, sistemik dan detail.

adalah melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, di antaranya;¹⁷

- a. Nilai kemanusiaan; karena manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Nilai-nilai kemanusiaan memberi dasar untuk hidup bersama dengan saling menghargai harkat dan martabat manusia sesamanya.
- b. Nilai-nilai persatuan hidup bersama; persatuan antar individu menjadi kelompok, kelompok menjadi masyarakat, masyarakat-masyarakat bersatu menjadi negara dan bangsa. Timbulillah persatuan Indonesia yang meliputi tanah air dan sosio-budayanya.
- c. Nilai kerakyatan atau demokrasi; yakni nilai-nilai yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh kelompok manusia dalam menghadapi masalah-masalah dan mengambil keputusan dengan cara-cara musyawarah dengan mufakat. Nilai-nilai kerakyatan juga menjadi dasar hidup

bergotong royong, hidup bertenggang rasa dan bekerja sama.

- d. Nilai-nilai keadilan; sebab dalam hidup bersama memasyarakat, membangun dan menegara, perlu adanya keadilan hak dan kewajiban sesuai dengan peran serta warga masyarakat dalam karyanya masing-masing.

Nilai-nilai tersebut di atas adalah substansi dan esensi dari multikulturalisme. Nilai-nilai atau norma yang diakui sebagai pandangan hidup suatu bangsa, seperti Pancasila bagi Indonesia, bukan hanya harus menjiwai kurikulum, akan tetapi harus mewarnai filsafat dan tujuan lembaga sekolah serta merembes ke dalam praktik pendidikan oleh guru di kelas. Dalam melaksanakan serta pengambilan berbagai keputusan guru haruslah mencerminkan nilai-nilai itu. Itulah sebabnya, walaupun setiap guru dapat saja memiliki norma atau sistem nilai yang dianggap baik, misalnya berasal dari agama tertentu, akan tetapi nilai-nilai itu jangan sampai

¹⁷ Ki Fudyantanta, *Filsafat Pendidikan Barat dan Filsafat Pendidikan Pancasila, Wawasan Secara Sistematis* (Yogyakarta: Amus, 2006), h.185

bertentangan dengan norma-norma masyarakat, yaitu Pancasila.¹⁸

Dalam kurikulum yang dikembangkan peranan guru bukan hanya berhubungan dengan mata pelajaran, melainkan ia harus menempatkan dirinya dalam suatu interaksinya dengan kebutuhan, kemampuan, dan kegiatan siswa. Sekolah sebagai lingkungan yang khusus hendaknya memberikan pengarahan sosial, dengan cara mendorong kegiatan-kegiatan yang bersifat instrinsik, dalam suatu arah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melalui imitasi, persaingan sehat, kerja sama, dan memperkuat kontrol.¹⁹

Dalam sekolah progresif istilah Nana merujuk pada pemikiran filsafat pendidikan John Dewey kontrol sosial terletak pada sifat kegiatannya yang berisikan kerja sama sosial. Di dalam kerja sama sosial ini, setiap siswa mempunyai kesempatan untuk memberikan sumbangan dan memikul tanggung jawab. Sekolah dan kelas

diciptakan sebagai suatu organisasi sosial. Di dalam organisasi sosial itu setiap siswa mempunyai kesempatan untuk memberikan sumbangan melakukan kegiatan-kegiatan, berpartisipasi, semua ini merupakan kontrol sosial.²⁰ Wujud kontrol sosial melalui organisasi sosial dalam filsafat progresivisme adalah bentuk-bentuk kerja sama multikultural setiap siswa di sekolah. Dengan demikian landasan filosofis pengembangan kurikulum berbasis multikultural adalah upaya memanfaatkan kemajemukan siswa (lintas keluarga, suku, agama, bahasa dll) sebagai satu cara untuk mencapai tujuan pendidikan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka dibawah ini dapat disebutkan landasan filosofis pengembangan kurikulum berbasis multikultural:

Filosofi Pengembangan Kurikulum Berbasis Multikultural

a. Filsafat pendidikan *Progressivism* dengan landasan *experimentalism* *pragmatism* dalam perspektif

¹⁸Wina, h.45

¹⁹Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori Dan Praktek*, Cet.2 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 44

²⁰ *Ibid*

multikultural disebut dengan pengalaman multikultural dengan menjadikan peranan guru sebagai fasilitator tujuan dari filosofi ini adalah Membentuk organisasi sosial sekolah berbasis multikulturalisme dan yang paling penting dalam hal ini adalah mengenai penerapan atau implementasi agar tercapai tujuan yang ingin dicapai.

- b. Filsafat pendidikan *Reconstructionism* dengan landasan *Experimentalism* *Pragmatisme* dalam perspektif multikultural disebut dengan Kontekstualitas multikultural dan rekonstruksi sosial dengan menjadikan peranan guru sebagai aktor dan peneliti tujuan dari filosofi ini adalah Sistem sosial dan kontrol sosial berbasis multikulturalisme dan yang paling penting dalam hal ini adalah mengenai penerapan atau implementasi agar tercapai tujuan yang ingin dicapai.

- c. Filsafat pendidikan pancasila dengan landasan pancasilais dalam perspektif multikultural disebut dengan nilai-nilai multikultural dan menjadikan peranan guru sebagai

sistem nilai tujuan dari Internalisasi nilai multikultural dan yang paling penting dalam hal ini adalah mengenai penerapan atau implementasi agar tercapai tujuan yang ingin dicapai.

Secara spesifik, dengan mempertimbangkan inspirasi yang didorong oleh Will Kymlicka, sebut Dede, maka kompetensi standar (dalam kurikulum) yang diharapkan adalah menjadi warga negara yang mampu hidup berdampingan bersama warga negara lainnya tanpa membedakan agama, ras, bahasa, dan budaya, dengan menghormati hak-hak mereka, memberi peluang kepada semua kelompok untuk mengembangkan budayanya, serta mampu mengembangkan kerjasama untuk mengembangkan bangsa menjadi bangsa besar yang dihormati dan disegani di dunia internasional.²¹

²¹ Dede Rosyada, *Pendidikan Multikultural...*, h.11.baca: Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship, A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford University Press, New York, 2000, h. 153.

3. Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Filosofis

Dalam berbagai analisis mengenai *trend* kehidupan dalam millenium ketiga, termasuk pula *trend* di dalam pengembangan sistem pendidikan. Kehidupan umat manusia dalam millenium yang baru mempunyai dimensi bukan hanya dimensi domestik, regional, nasional, tetapi global. Kita hidup di dalam dunia yang demikian terbuka, dunia tanpa batas, oleh sebab itu kehidupan global bukan hanya merupakan tantangan tetapi juga membuka peluang-peluang baru di dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bangsa Indonesia. Sistem pendidikan nasional tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab untuk memberikan jawaban yang tepat terhadap tantangan dan peluang kehidupan global.²²

Berkenaan dengan hal tersebut, munculnya paradigma pendidikan multikultural sebagai upaya menjawab tantangan global dari sebuah sistem

pendidikan patut diwujudkan secepat mungkin. Namun untuk sampai ke arah sana, khususnya dalam pendidikan Islam, dalam perspektif filosofis perlu adanya pemahaman baru terhadap wilayah keilmuan agama Islam. Dalam hal ini, M. Amin Abdullah berusaha memetakan tiga wilayah keilmuan agama Islam dimaksud, yaitu:²³

- a. Wilayah praktik keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu yang telah diinterpretasikan sedemikian rupa oleh para ulama, para ahli, dan masyarakat pada umumnya. Pada wilayah ini biasanya tanpa melalui klarifikasi dan penjernihan teoritik keilmuan, yang dipentingkan adalah pengamalan, sehingga perbedaan antara agama dan tradisi, agama dan budaya, antara *belief* dan *habits of mind* sulit dipisahkan;
- b. Wilayah teori-teori keilmuan yang dirancang dan disusun sistematika dan metodologinya oleh para ilmuwan dan para ulama sesuai bidang kajian masing-masing. Yang ada pada

²²H.A.R Tilaar,., *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan*, Jakarta, Grasindo, 2004, h. 15.

²³M. Amin Abdullah, *Islamic Studies: Di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, h. 70-74

wilayah ini pada dasarnya adalah teori-teori keilmuan agama Islam yang diabstraksikan baik secara deduktif dari nash-nash atau teks-teks wahyu maupun secara induktif dari praktek keberagamaan masyarakat muslim;

- c. Wilayah telaah kritis (*meta discourse*) terhadap sejarah jatuhnya banggunya teori-teori yang disusun oleh kalangan ilmuan dan para ulama pada lapis kedua, tidak terkecuali muncul dan tenggelamnya berbagai konsep dan teori-teori pendidikan Islam.

Lapis ketiga, wilayah telaah kritis (termasuk telaah kritis terhadap teori-teori pendidikan Islam para era klasik, era pertengahan, era modern, dan era pos modern), yang demikian kompleks dan *sophisticated* menjadi bidangn kajian filsafat ilmu-ilmu keislaman, seperti dikaji oleh Muhammed Arkoun, Muhammad Abid al-Jabiry, Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zaid, Hasan Hanafi, dan Mulyadi Kartanegara. Dari hari kehari semakin dirasakan wilayah telaah kritis perlu untuk dikembangkan lebih jauh dan mendalam karena

beberapa faktor, yaitu: *Islamic Studies* bukanlah sebuah disiplin ilmu yang tertutup, agama Islam bukan satu-satunya agama yang hidup (*living religion*) pada saat sekarang, dan semakin dekatnya hubungan kontak individu maupun sosial akibat kemajuan teknologi, tranformasi, komunikasi, dan informasi yang super canggih sehingga semakin memperpendek jarak dan tapal batas ruang waktu yang biasa diimajinasikan oleh umat beragama pada abad-abad sebelumnya.²⁴

Untuk mendukung tercapainya wilayah telaah kritis, maka pola pemikiran keagamaan Islam, termasuk pendidikan Islam, yang perlu dikedepankan adalah bukan pola pikir yang bercorak *absolutely absolute* atau *absolutely relative*, tetapi pemikiran yang bercorak *relatively absolute*. Pola pikir, cara pandang, dan model berpikir yang terbungkus dalam selimut kepercayaan dan keimanan yang bersifat *absolutely absolute* atau dalam bahasa agama disebut *ta'abbudy* dalam era global seperti sekarang ini, baik secara internal dalam lingkup pemeluk agama

²⁴M. Amin Abdullah,...h 74-75

Islam maupun eksternal dalam lingkup lintas agama, sudah tidak cocok untuk dipertahankan. Sebab pola pikir yang demikian hanya akan melahirkan *claim of salvation* dan *truth claim* yang demikian kaku dan rigid, sehingga objektivitas yang dianut adalah objektivitas semu dan sikap *right or wrong is my country*. Pandangan dan cara pikir ini akan sulit berkomunikasi dengan orang lain dan berujung pada terpupuknya jiwa curiga (*distrust of moral*), sehingga hidup beragama menjadi tidak tenang dan penuh kekhawatiran (*discalm and full anxiety*). Perilaku yang mengakibatkan terbunuhnya banyak jiwa, seperti bom di Bali, Jakarta, Medan, Sulawesi, Ambon, dan seterusnya menurut cara pandang *absolutely absolute*, boleh jadi, menjadi “halal.”

Sementara pola pikir dan cara pandang kedua yakni *absolutely relative* atau dalam bahasa agama disebut *ta'aqquly* juga mengandung kecenderungan-kecenderungan ke arah terbentuknya sikap dan pandangan “nihilisme” dan “sekularisme”, yang mengarah pada perilaku *immoral* dan

inhuman dalam bentuk yang beragam. Pola pikir ini juga tidak apresiatif terhadap hidup dan kehidupan umat manusia, karena kehidupan manusia selamanya membutuhkan pedoman hidup, aturan, dan sistem nilai sosial yang disepakati dan dianut bersama, baik sistem nilai yang bersumberkan pada ajaran agama, perundang-undangan, atau adat-istiadat yang dianut masyarakat setempat.

Dalam pandangan Amin Abdullah, kedua model pola pikir *absolutely absolute* dan *absolutely relative*, bukanlah pilihan terbaik dalam menata kehidupan beragama umat manusia, baik internal seagama maupun eksternal antar lintas agama, pada era modern dan postmodern seperti sekarang ini. Menurutnya, dalam memasuki millenium baru, diperlukan sikap-cara pandang dan pola pikir keagamaan Islam yang baru dalam menghadapi realitas kehidupan yang demikian plural. Sikap dan cara pandang keagamaan Islam yang baru ini, sekaligus akan mempunyai dampak yang positif terhadap pola hubungan antara etnis, ras, suku,

golongan, dan sebagainya di tanah air. Sikap dan cara pandangan keagama

Islam dimaksud adalah cara pandang dan pola pikir *relatively absolute*.²⁵

Cara pandang ketiga ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari cara pandang pertama dan kedua dan melahirkan cara pandang ketiga yang dalam bahasa agama diistilahkan dengan *Ta'abbudy absolute* dan *ta'aqquly relative* yang menyatu dalam perilaku keberagaman umat manusia. Pola pikir ini dipandang akan mampu memberikan angin segar yang dapat menghantarkan pada jenis pemahaman yang lebih bersifat inklusif (*hanif*) dan terbuka (*open ended*) terhadap realitas keberagaman manusia yang sangat majemuk. Pandangan ini lebih bersifat *fundamental-kritis-inklusif* yang mampu mengkritisi dan membedah bercampur-aduknya doktrinal-teologis dengan kepentingan kultural-sosiologis dalam kehidupan umat beragama pada umumnya, sehingga tampilan dalam

kehidupan sehari lebih bersahabat, inklusif, humanis, dan pluralis.²⁶

4. Prinsip-Prinsip Filosofis PAI Berbasis Multikultural

Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis multikultural penting ditawarkan antara lain karena ada kecenderungan bahwa para penganut agama bersikap intoleran terhadap penganut agama lainnya, eksklusif, egois, *close-minded*, dan berorientasi pada kesalehan individu. Menghadapi kehidupan masyarakat yang multikultural perlu dimulai dari perubahan paradigma pendidikan dalam PAI. PAI tidak hanya menggunakan paradigma *learning to think, to do* dan *to be*, tetapi juga *to live together*.²⁷

Sebelum membahas beberapa prinsip penting pendidikan agama berbasis multikultural, perlu dikemukakan beberapa asumsi filosofis

²⁶M. Amin Abdullah, *Rekonstruksi Metodologi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius*, dalam Ahmad Baidowi dkk., (peny.), *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Yogyakarta, Suka Press dan LPKM Instrospektif IAIN Suka, 2003, h. 23

²⁷Kasinyo Harto, "Membangun Pola Pembelajaran Pendidikan Agama yang Berwawasan Multikultural", *Conciencia*, Vol. 1 No. 2 (2007), h. 25.

²⁵M. Amin Abdullah,... h, 86-90

pendidikan multikultural itu sendiri. *Pertama*, tidak lagi terbatas pada pandangan bahwa pendidikan (*education*) adalah persekolahan (*schooling*) atau memandang bahwa pendidikan multikultural sama dengan program-program sekolah formal. Pendidikan multikultural harus berpijak pada pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan. Pandangan ini membebaskan pendidik dari anggapan selama ini bahwa tanggung jawab utama dalam mengembangkan kompetensi peserta didik semata-mata berada di tangan mereka. Dalam konteks pendidikan multikultural justru meniscayakan semakin banyak pihak yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi peserta didik, karena program-program sekolah akan selalu terkait dengan hal-hal di luar sekolah.

Kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini.

Dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program-program pendidikan multikultural untuk menghindari kecenderungan memandang peserta didik secara stereotip menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan peserta didik dari berbagai kelompok etnik.

Ketiga, pengembangan kompetensi dalam suatu "kebudayaan baru" biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, bahkan dapat dilihat dengan jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mempertahankan dan memperluas solidaritas kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis.

Keempat, kemungkinan bahwa pendidikan (baik di dalam maupun di luar sekolah) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan peserta didik dari konsep dwi budaya atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi. Dikotomi semacam ini bersifat membatasi individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia yang mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri peserta didik.²⁸

Jika dikaitkan dengan Pendidikan Agama Islam sebagai sebuah bidang studi, menurut Zakiuddin Baidhawi ada tujuh asumsi paradigmatis PAI berbasis

multikultural, yaitu: mendidik peserta didik untuk:²⁹

a. Belajar Hidup dalam Perbedaan

Nilai-nilai budaya, tradisi, dan kepercayaan senantiasa mengiringi pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak. Ketika ia mulai masuk sekolah nilai-nilai yang terbentuk dari dalam pengasuhan dalam keluarga ini terus ia bawa. Maka setiap anak memiliki latar belakang dan nilai-nilai yang berbeda pula. Ini realitas yang harus dipertimbangkan dalam PAI berbasis multikultural. Perbedaan nilai-nilai ini meniscayakan PAI tidak hanya berpijak pada paradigma *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, tetapi juga *learning to live together*. Paradigma yang disebut terakhir ini dalam konteks PAI akan menjadikan PAI sebagai proses: (a) pengembangan sikap toleran, empati, dan simpati yang menjadi syarat utama suksesnya koeksistensi dalam keragaman agama; (b) klarifikasi nilai-

²⁸Gwendolyn C. Baker, *Planing and Organizing for Multicultural Instruction* (California: Addison-Wesley Publishing Company, 1994), h. 25-26

²⁹ Zakiyuddin Baidhawy, "Membangun Harmoni dan Perdamaian melalui Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural", *Lokakarya Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Australian Indonesia Partnership dan Kemenag RI, 10-13 April 2008), h. 75-78.

nilai kehidupan bersama menurut perspektif agama-agama; (c) pendewasaan emosional; (d) kesetaraan dalam partisipasi; (e) kontrak sosial baru dan aturan main kehidupan bersama antar agama.

b. Membangun Saling Percaya

Penguatan kultural masyarakat memerlukan modal sosial yang dibangun dari rasa saling percaya. Modal sosial adalah seperangkat nilai atau norma informal yang dimiliki bersama suatu masyarakat yang mendorong terjadinya kerjasama satu sama lain. Norma yang dapat menjadi modal sosial adalah norma yang menonjolkan kebaikan-kebaikan. Norma semacam inilah yang akan membangun rasa saling percaya antara satu anggota masyarakat dengan anggota yang lain. PAI berbasis multikultural harus mengusung norma norma kebaikan yang merupakan modal sosial untuk tumbuhnya rasa saling percaya antar anggota masyarakat. PAI multikultural perlu menanamkan *mutual trust* atau saling pengertian antar agama, budaya dan etnik. Oleh karena itu modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan

kebersamaan, keharmonisan, mobilitas ide, saling kepercayaan dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama.³⁰

c. Memelihara Saling Pengertian

PAI berbasis multikultural juga harus mendorong peserta didik dengan berbagai etnik dan latar belakang untuk dapat memelihara rasa saling pengertian baik dengan teman sejawat maupun dengan anggota masyarakat lain yang berbeda latar belakang. Saling pengertian berarti kesadaran bahwa nilai-nilai mereka dan kita dapat berbedaan mungkin saling melengkapi serta berkontribusi terhadap keharmonisan hubungan. Selain saling memahami PAI multikultural juga mendorong peserta didik siap menerima perbedaan di antara berbagai keragaman paham agama dan kultur masyarakat yang beragama.

d. Menjunjung Sikap Saling Men/ghargai (*Mutual Respect*)

PAI berbasis multikultural harus mengarahkan peserta didik agar

³⁰ Mukhibat, *Rekonstruksi Spirit Harmoni Berbasis Masjid* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI, 2014), 34.

memiliki sikap saling menghargai terhadap semua orang, apapun latar belakangnya. Sikap ini muncul jika seseorang memandang orang lain secara setara. Pada kenyataannya ajaran agama yang terkandung dalam PAI memang mengajarkan Muslim untuk menghormati dan menghargai sesama manusia. Inilah ajaran universal yang mestinya ditonjolkan. PAI multikultural diharapkan mampu menumbuhkembangkan kesadaran pada peserta didik bahwa kedamaian dan harmoni dalam kehidupan masyarakat hanya akan tumbuh jika sikap saling menghormati dan menghargai benar-benar diamalkan dalam kehidupan, bukan sikap saling merendahkan. Sikap saling menghargai akan melahirkan sikap saling berbagi diantara semua individu maupun kelompok sosial.

e. Terbuka dalam Berpikir

Sikap keterbukaan dalam berpikir pada peserta didik merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan secara umum. Demikian pula dalam PAI berwawasan multikultural yang mendorong peserta didik membuka diri terhadap kenyataan hidup yang

beragam, khususnya dalam hal pemahaman agama. Peserta didik perlu disiapkan untuk berhadapan dengan model pemahaman agama yang berbeda dari apa yang diajarkan selama ini. Dengan sikap terbuka ini peserta didik diharapkan mau memahami makna eksistensi dirinya, identitasnya di tengah keragaman budaya dan agama yang ada.

f. Apresiasi dan Interdependensi

PAI multikultural juga perlu menghadirkan sikap apresiatif terhadap keragaman dan menyadarkan tentang adanya saling ketergantungan atau interdependensi antara satu manusia dengan yang lain.

g. Resolusi Konflik dan Rekonsiliasi Nirkekerasan

Konflik dengan latar belakang sebab yang beragam (baik karena agama, etnik, ekonomi, sosial dan budaya) adalah fakta kehidupan yang sulit dibantah keberadaannya. PAI multikultural memberi kontribusi bagi upaya mengantisipasi munculnya konflik ini dengan cara menginternaslisasikan kekuatan spiritual yang menjadi sarana integrasi dan kohesi sosial (*social*

cohesion) dan menawarkan bentuk-bentuk resolusi konflik. Resolusi kemudian dilanjutkan dengan rekonsiliasi yang merupakan upaya perdamaian melalui pengampunan atau pemaafan. PAI perlu mengarahkan peserta didik agar menjadi manusia yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, meskipun tahu bahwa pendekatan hukum juga dapat dilakukan. Akan tetapi memberi maaf jauh lebih luhur dan mulia.³¹

Dengan memahami asumsi-asumsi paradigmatis di atas, maka apa yang dimaksud PAI berbasis multikultural menurut Baidhawi dapat didefinisikan sebagai:

Gerakan pembaruan dan inovasi pendidikan agama dalam rangka menanamkan kesadaran akan pentingnya hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan agama-agama, dengan spirit kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami dan menghargai persamaan,

³¹Baidhawi, "Membangun Harmoni dan Perdamaian Melalui Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural", h. 79-85

*perbedaan dan keunikan agama-agama, terjalin dalam suatu relasi dan independensi dalam situasi saling mendengar dan menerima perbedaan perspektif agama-agama dalam satu dan lain masalah dengan pikiran terbuka, untuk menemukan jalan terbaik mengatasi konflik antar agama dan menciptakan perdamaian melalui sarana pengampunan dan tindakan nirkekerasan.*³²

PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan kemunculan multikulturalisme tidak terlepas dari pengaruh filsafat **Post-Modernisme**. Prinsip-prinsip paradigmatis yang menjadi dasar filosofis bagi pendidikan Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis multikultural adalah sebagai berikut: 1) mendidik peserta didik untuk berani belajar hidup dalam perbedaan; 2) mendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam membangun rasa saling percaya kepada semua orang dengan latar belakang berbeda; 3)

³² *Ibid*

mendorong peserta didik untuk mampu memelihara saling pengertian di antara sesama teman yang beragam; 4) menjadikan peserta didik dapat menjunjung sikap saling menghargai; 5) berorientasi untuk melahirkan peserta didik untuk terbuka dalam berpikir, mampu membuka diri bagi pandangan orang lain yang berbeda; 6) menghasilkan peserta didik yang dapat bersikap apresiatif dan memahami bahwa dalam hidup ada keharusan menjalin relasi yang menunjukkan interdependensi antara satu orang/kelompok dengan orang/kelompok lain; 7) mendorong peserta didik ke arah pemahaman pentingnya resolusi konflik dan rekonsiliasi tanpa kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, 2006. *Islamic Studies: Di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Akbarjono, A. (2018). EKSISTENSI GURU DALAM PENANAMAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL DI ERA MILENIAL. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 17(2), 171-180.
- Baidowi, Ahmad dkk., (peny.), 2003. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Yogyakarta, Suka Press dan LPKM Instrospektif IAIN Suka.
- Fudyantanta, Ki, 2006, *Filsafat Pendidikan Barat dan Filsafat Pendidikan Pancasila, Wawasan Secara Sistematis*, Yogyakarta: Amus.
- Gafur, Waryono Abdul, 2005, *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks* Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Gwendolyn C. Baker, 1994. *Planing and Organizing for Multicultural Instruction* California: Addison-Wesley Publishing Company.
- Harto, Kasinyo, "Membangun Pola Pembelajaran Pendidikan Agama yang Berwawasan Multikultural", *Jurnal Conciencia*, Vol. 1 No. 2 (2007)
- Jalaluddin dan Abdullah Idi, 2009, *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Lasijan, *Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam*, *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014.
- Lyotard, Jean Farncois, 2009, *Kondisi Postmodern: Suatu Laporan Mengenal Pengetahuan*, terj. D. Dian Ellyati, Surabaya: Selasar Publishing.
- Muhaimin, 2010, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukhibat, 2014, *Rekonstruksi Spirit Harmoni Berbasis Masjid*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI

- Rizal Muntasyir, dkk, 2004, *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohimin Rohimin, (2019), INSTRUMEN MULTIKULTURALISME DESA PERCONTOHAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Kajian Pendahuluan Observatif Desa Rama Agung Sebagai Desa Percontohan Kerukunan Umat Beragama Di Bengkulu. *Edukasia Multikultura: Jurnal Pendidikan, Vol 1, No. 1*
- Rosyada, Dede (2014) *Pendidikan Multikultural di Indonesia; Sebuah Pandangan Konsepsional*, dalam *Jurnal Sosio Didaktika*: Vol. 1, No. 1 Mei 2014,
- Sanjaya, Wina, 2008, *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Jakarta: Kencana
- Shihab, M. Quraish, 1998. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Sugiharto, 1996. *Posmodernisme Tantangan Bagi Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius,
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 1999. *Pengembangan Kurikulum, Teori Dan Praktek*, Cet.2. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R., 2004. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan*, Jakarta, Grasindo.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Yanuarti, E. (2017). Pemikiran Pendidikan Ki. Hajar Dewantara dan relevansinya Dengan Kurikulum 13. *Jurnal Penelitian, 11(2)*, 237-265.
- (2016). Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat Idealisme. *BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam, 1(2)*.
- Yulaelawati, Ella, 2004, *Kurikulum dan Pembelajaran, Filosofi, Teori dan Aplikasi*, Bandung: Pakar Raya.
- Zakiyuddin Baidhawiy, "Membangun Harmoni dan Perdamaian melalui Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural", *Lokakarya Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Australian Indonesia Partnership dan Kemenag RI, 10-13 April 2008.